

Tinjauan Mata Kuliah

Mata kuliah Negara Bagian (*State*) dan Pemerintah Lokal (*Local Government*) mendiskusikan sistem pemerintahan di bawah pemerintah pusat. Negara yang berbentuk federasi pemerintahan di bawah pemerintah pusat adalah negara bagian sedangkan pemerintah lokalnya berada di bawah negara bagian. Adapun negara yang berbentuk kesatuan (*unitary*) pemerintahan lokalnya langsung berada di bawah pemerintah pusat.

Melalui Buku Materi Pokok Negara Bagian dan Pemerintah Lokal (*State and Local Government*), Anda kami ajak mendiskusikan pemerintah negara bagian dan pemerintah lokal. Pada akhir pembelajaran Anda diharapkan dapat menganalisis problema pemerintah lokal di negara kita dan mampu memberikan solusi inovatif demi perbaikan tata kelola pemerintahan modern NKRI.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kami membagi mata kuliah ini menjadi sembilan modul. Kesembilan modul tersebut sebagai berikut.

1. Modul 1 membahas sejarah pemerintahan daerah di Indonesia yang terdiri atas tiga kegiatan belajar berikut:
 - a. pemerintahan lokal pada masa kolonial,
 - b. rancangan pemerintahan lokal/daerah oleh *founding fathers* dan norma konstitusi,
 - c. pemerintahan lokal di alam kemerdekaan.
2. Modul 2 membahas politik hukum pemerintahan daerah di Indonesia yang terdiri atas tiga kegiatan belajar berikut:
 - a. pengertian politik hukum,
 - b. pemerintahan daerah dalam Konstitusi RIS dan UUDS 1950,
 - c. perkembangan politik hukum pemerintahan daerah pasca perubahan UUD NRI 1945.
3. Modul 3 membahas pemerintahan lokal/daerah yang terdiri atas tiga kegiatan belajar berikut:
 - a. *local government*,
 - b. asas-asas pemerintahan daerah,
 - c. tipologi pemerintahan daerah,
4. Modul 4 membahas struktur dan wewenang pemerintah daerah yang terdiri atas tiga kegiatan belajar berikut:
 - a. struktur pemerintah lokal/daerah,
 - b. wewenang pemerintah lokal/daerah,
 - c. asal-usul wewenang pemerintah daerah.

5. Modul 5 membahas susunan pemerintahan lokal dan status pemerintahan desa dalam sistem pemerintahan daerah yang terdiri atas tiga kegiatan belajar berikut:
 - a. susunan pemerintah lokal otonom,
 - b. susunan pemerintah lokal administratif dan instansi vertikal,
 - c. status pemerintahan desa dalam sistem pemerintahan daerah.

6. Modul 6 membahas hubungan antarpemerintahan: pusat, negara bagian, dan pemerintah lokal yang terdiri atas tiga kegiatan belajar berikut:
 - a. hubungan pemerintah pusat, negara bagian dan lokal dalam sistem federasi,
 - b. hubungan pemerintah pusat dan pemerintah lokal dalam sistem negara kesatuan,
 - c. hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 1945 dan UUD NRI 1945.

7. Modul 7 membahas keuangan dan pelayanan publik pemerintah daerah yang terdiri atas tiga kegiatan belajar berikut:
 - a. keuangan daerah,
 - b. anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah,
 - c. pelayanan publik pemerintah lokal/daerah.

8. Modul 8 membahas negara bagian dan pemerintah lokal di berbagai negara yang terdiri atas tiga kegiatan belajar berikut:
 - a. negara bagian dan pemerintah lokal di Perancis, Italia, Jerman dan Swedia,
 - b. negara bagian dan pemerintah lokal di Denmark, Inggris, Amerika Serikat dan Kanada,
 - c. negara bagian dan pemerintah lokal di Belanda, Jepang dan Malaysia.

9. Modul 9 membahas kontrol pengawasan terhadap pemerintahan daerah yang terdiri atas tiga kegiatan belajar berikut:
 - a. kontrol pengawasan kepada pemerintahan lokal,
 - b. pengawasan peradilan,
 - c. pengawasan masyarakat.

Peta Kompetensi
MAPU5204/ Negara Bagian (State) dan Pemerintah Lokal
(Local Government) /3 sks

